

CIVIL SOCIETY

KK
Fis P. 01 / 05
Wir

**PERAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN
DALAM MENDORONG TUMBUHNYA
CIVIL SOCIETY DI TINGKAT LOKAL**
(Studi Desa Pakisaji Kec. Kalidawir Kabupaten Tulungagung)



Disusun Oleh :

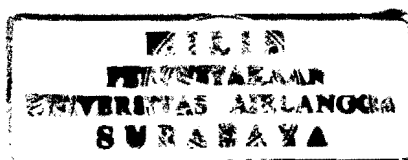
DENY WIRATAMA
NIM : 070016388

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEMESTER GENAP TAHUN 2003/2004**

**PERAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN
DALAM MENDORONG TUMBUHNYA
CIVIL SOCIETY DI TINGKAT LOKAL
(Studi Desa Pakisaji Kec. Kalidawir Kabupaten Tlulungagung)**

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Studi Pada
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



Disusun Oleh :

**DENY WIRATAMA
NIM : 070016388**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEMESTER GENAP TAHUN 2003/2004**

Lembar Persetujuan

Disetujui untuk siap diujikan

Surabaya, 11 Juni 2004

Dosen Pembimbing



Dra. Siti Aminah, MA
NIP: 131836624

Lembar Pengesahan

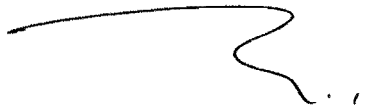
Skripsi ini telah dipertahankan di depan Komisi Penguji pada
tanggal 2 Juli 2004

Ketua Penguji

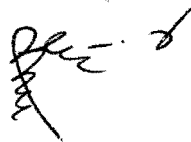


Drs. Privatmoko, MA
130937952

Anggota



Dra Siti Aminah, MA
131836624



Drs. Haryadi, Msi
131653466

Abstraksi

Terjadinya krisis ekonomi pertengahan 1997 telah membawa implikasi yang luas di masyarakat, terutama ini dirasakan oleh masyarakat pada lapisan bawah. Krisis ekonomi yang ditandai dengan melambungnya dollar terhadap rupiah tersebut menyebabkan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat mengalami kemunduran, bukan saja terganggunya kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi di masyarakat, namun juga semakin kritisnya kondisi masyarakat berhadapan dengan kebutuhan hidup yang makin melambung.

Dari segi sosial ekonomi maupun politik, ini memicu makin meningkatnya pengangguran dan semakin kuatnya tekanan kemiskinan dan tentu ini sangat rawan menimbulkan gejolak di masyarakat.

Untuk mengeliminasi kemungkinan negatif yang tidak diinginkan dan mengeliminasi penderitaan masyarakat akibat krisis ekonomi, terutama dirasakan oleh masyarakat miskin agar tidak makin terpuruk berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah.

Untuk merangsang perkembangan ekonomi dan memperkecil dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan salah satu upaya yang ditempuh pemerintah adalah lewat Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Keberadaan PPK yang didalamnya memuat prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, desentralisasi, keberpihakan kepada orang miskin, kesinambungan dan kompetisi yang sehat diharapkan mampu memancing masyarakat untuk aktif dalam proses pembangunan, sekaligus mampu memberdayakan masyarakat lewat pemberian bantuan modal usaha dan pembangunan sarana dan prasarana pendukung perekonomian masyarakat. Semakin tingginya partisipasi dan kontrol masyarakat dalam proses pembangunan desa diharapkan mampu mentransformasi kesadaran masyarakat untuk menjadi subyek pembangunan dalam proses pembangunan yang ada di daerahnya.

Semakin aktif dan berdayanya organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok masyarakat diharapkan ke depan menumbuhkan *civil society* kuat. Masyarakat semakin aktif, kritis, mandiri, dan berdaya dalam menjawab setiap tantangan atau hambatan di dalam proses pembangunan desa. Dalam konteks otonomi daerah peran PPK diharapkan mampu memancing partisipasi aktif masyarakat sehingga mendorong tumbuhnya *good governance* bagi terwujudnya demokratisasi.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat